



Pemkot Pastikan Tak Ada Pelanggaran Distribusi Elpiji

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Perdagangan memastikan hingga saat ini tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam penyaluran elpiji bersubsidi atau gas dalam tabung isi tiga kilogram di kota tersebut.

"Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada pelanggaran dan penyaluran elpiji tiga kilogram masih sesuai dengan prosedur yang berlaku," kata Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Jalaludin saat Sosialisasi Stabilisasi Ketersediaan LPG Bersubsidi di Yogya, Selasa (23/6) lalu.

Menurutnya, dalam melakukan distribusi atau penyaluran elpiji bersubsidi ke pangkalan maupun agen resmi di wilayah Kota Yogyakarta telah menerapkan sistem digitalisasi. Pada awalnya sistem digitalisasi dalam distribusi elpiji menghadapi berbagai penolakan, namun seiring perkembangan teknologi, sistem tersebut kini mulai diterima dan mampu meningkatkan transparansi distribusi.

"Distribusi dan stok kuota sudah menggunakan sistem digital. Pengiriman elpiji menggunakan kode OTP yang dicocokkan antara sopir distribusi dengan agen tujuan. Dengan demikian, potensi penyelewengan distribusi dapat diminimalkan," ujarnya.

Dia mengatakan, guna mem-

berikan pemahaman kepada agen dan pangkalan terkait distribusi dan ketersediaan elpiji tiga kilogram, salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Stabilisasi Ketersediaan Elpiji Bersubsidi. Menurutnya, elpiji tiga kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang sama bagi seluruh pelaku distribusi agar penyaluran tepat sasaran. "Elpiji tiga kilogram diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Karena masih terjadi ketidaktepatan sasaran, kami memberikan pemahaman kepada para agen dan pangkalan agar dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan," katanya.

Dijelaskan, menghadapi masa liburan sekolah, pemerintah tetap mewaspadaai potensi peningkatan kebutuhan elpiji, mengingat kota pariwisata Yogyakarta diperkirakan akan mengalami peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor kuliner. "Ketika libur panjang, sektor kuliner seperti di Pasar Kranggan dan Pasar Ngasem sangat ramai. Salah satu kebutuhan utama pelaku usaha kuliner adalah elpiji, sehingga permintaan diperkirakan akan meningkat," katanya.

Sementara itu, Anggota Departemen Hukum, Advokasi dan Perpajakan DPP Hiswana Migas DIY, R Moch Lustio Ario Wibisono,

menyampaikan bahwa kondisi distribusi LPG 3 kilogram di Yogyakarta selama ini berjalan kondusif. "Di Yogyakarta hampir tidak pernah ada laporan terkait pelanggaran distribusi. Agen dan pangkalan menjalankan tugasnya dengan baik sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Saat ini terdapat sekitar 14 agen dan sekitar 960 pangkalan resmi yang tersebar di 45 kelurahan di 14 kacamatan di Kota Yogyakarta. Menurutnya, keberadaan pangkalan yang tersebar tersebut memudahkan masyarakat memperoleh LPG dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sesuai. Masyarakat juga dapat mengetahui lokasi pangkalan terdekat melalui laman resmi Pertamina sehingga akses terhadap LPG bersubsidi menjadi lebih mudah.

Hiswana Migas juga mengungkapkan sejumlah tantangan penyaluran LPG pada tahun 2026, di antaranya peningkatan kebutuhan nasional yang diproyeksikan naik hampir 9,8 persen, revisi regulasi terkait LPG bersubsidi, hingga penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro pengguna LPG 3 kilogram. "Kami berkomitmen menjaga penyaluran LPG bersubsidi agar tetap tersedia, terjangkau, tercatat, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak," ujarnya. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005